

# BAB I

## P E N D A H U L U A N

---

### 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang terletak di Pulau Nias. Kabupaten Nias Selatan berpenduduk 275.422 jiwa (Januari 2005). Nias Selatan sebelumnya adalah bagian dari wilayah Kabupaten Nias. Kabupaten Nias Selatan mendapatkan status otonomnya pada 25 Februari 2003 yang kemudian diresmikan pada 28 Juli 2003.

Secara geografis, Kabupaten Nias Selatan terdiri atas 104 gugusan pulau besar dan kecil dengan letak yang memanjang sejajar Pulau Sumatera. Panjang pulau-pulau itu lebih kurang 60 kilometer, lebar 40 kilometer. Dari seluruh gugusan pulau itu, ada empat pulau besar, yakni Pulau Tanah Bala (39,67 km<sup>2</sup>), Pulau Tanah Masa (32,16 km<sup>2</sup>), Pulau Tello (18 km<sup>2</sup>), dan Pulau Pini (24,36 km<sup>2</sup>). Tidak seluruh pulau berpenghuni. Masyarakat Nias Selatan tersebar di 21 pulau dalam delapan kecamatan.

Sektor ekonomi kabupaten ini, terutama didukung oleh sektor pertanian dan pariwisata. Dari sektor pertanian, komoditas unggulan terutama dari perkebunan, yakni kelapa, karet, dan nilam. Seluruhnya merupakan perkebunan rakyat. Sentra perkebunan kelapa di Kecamatan Teluk Dalam, Lahusa, dan Amandraya. Sedangkan di Kecamatan Lahusa, Lolomatua, dan Lolowa'u merupakan sentra tanaman karet serta nilam. Hasil pertanian lain yang menjadi unggulan adalah padi dan ikan dengan sentra produksi tanaman padi berada di Kecamatan Teluk Dalam, Lahusa, dan Amandraya. Sementara daerah tangkapan ikan di Nias Selatan terdapat di Kecamatan Pulau-pulau Batu dan Hibala.

Pada umumnya komoditas pertanian daerah ini dijual dalam bentuk apa adanya, belum melalui proses pengolahan. Para pekerja menggarap komoditas andalan secara tradisional. Pada saat panen, hasil perkebunan dan perikanan dikirim ke Sibolga melalui jalur transportasi laut. Adapun padi dimanfaatkan untuk konsumsi masyarakat setempat.

Di bidang pariwisata, potensi wisata Kabupaten Nias Selatan terletak pada jalur yang disebut Segitiga Emas Industri Pariwisata Nias Selatan (RTRW Kabupaten Nias Selatan Tahun 2004-2014), yakni Kecamatan Lolowa'u-Gomo-Pulau-pulau Batu dengan porosnya adalah *Omo Hada*, yang merupakan rumah tradisional di Desa Bawomataluo, Kecamatan Teluk Dalam. Daerah Nias Selatan terkenal dengan tradisi *hombu batu*-nya atau yang lebih dikenal dengan lompat batu. Selain itu, Sorake, salah satu pantai di daerah itu, akrab di telinga penggemar olahraga selancar. Turnamen selancar tingkat dunia beberapa kali diadakan di pantai itu.

Objek-objek wisata alam sangat potensial di Kabupaten Nias Selatan. Di Kecamatan Pulau-pulau Batu terdapat lokasi menyelam, terumbu karang, serta ikan-ikan hias dan pantai berpasir putih. Adapun peninggalan zaman megalitik berupa batu-batu megalit di Kecamatan Lahusa dan Gomo. Andalan wisata lainnya adalah Pantai Lagundri yang berpasir putih serta Pantai Sorake (Kecamatan Teluk Dalam) yang ombaknya jadi sarana olahraga selancar. Meskipun sebagai salah satu tulang punggung perekonomian, kegiatan

pariwisata di Kabupaten Nias Selatan belum optimal dikembangkan, baik dalam hal penyediaan infrastrukturnya maupun manajemennya.

Di Teluk Dalam juga terdapat desa adat yaitu Desa Bawomataluo, yang dapat dikatakan sebagai cagar budaya karena merupakan sebuah potret sejarah dari perkembangan budaya Nias. Di desa ini terdapat deretan rumah tradisional terbuat dari kayu dengan arsitektur khas Nias yang masih dihuni oleh penduduk sebagaimana layaknya kompleks perumahan. Di perkampungan itu juga bisa disaksikan tradisi *hombo batu* atau lompat batu yang terkenal itu.

Pada 28 Maret 2005, gempa melanda kepulauan Nias dengan kekuatan 8,7 skala Richter. Sebelumnya pada 26 Desember 2004, Nias juga mengalami tsunami yang juga bagian dari bencana yang menimpa Aceh. Dari data pemerintah setempat, tercatat 138 orang meninggal dunia, 5.845 rumah warga hancur, juga 274 tempat ibadah, 20 perkantoran, dan 217 bangunan sekolah di Kabupaten Nias Selatan. Peristiwa ini melumpuhkan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut, termasuk kegiatan pertanian dan pariwisata. Sementara pemerintah daerah tidak mampu mengendalikan kerusakan-kerusakan dengan sumberdaya yang terbatas.

Berkaitan dengan kegiatan pembangunan di Nias, saat ini UN-Habitat menjadi fasilitator dalam proses perencanaan partisipatif yang merupakan bagian dari ANSSP (*Aceh-Nias Settlement Support Programme*) bekerja sama dengan UNDP's AERTR (*Aceh Emergency Response and Transitional Recovery Programme*) dalam membangun 3500 rumah di 13 kecamatan di Aceh dan Nias.

Program yang diselenggarakan UN-Habitat ini dinamakan Program Pembangunan Kecamatan di Aceh dan Nias (PeKAN). Program ini bertujuan untuk menyiapkan kecamatan-kecamatan untuk lebih siap dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan program yang berbasis pada partisipasi masyarakat ini diharapkan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar merupakan hasil dari aspirasi dan partisipasi masyarakat sehingga hasilnya nanti dapat lebih tepat sasaran.

Sistem infrastruktur menjadi pendukung utama dalam sistem sosial dan sistem ekonomi, oleh karena itu setiap perancangan masing-masing sistem infrastruktur maupun keseluruhannya harus dilakukan dalam konteks keterpaduan dan menyeluruh, termasuk di dalamnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan realisasi pembangunan menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan. Dalam tataran pembangunan permukiman, telah terjadi pergeseran paradigma pembangunan yaitu dari paradigma ekonomi dan sosial ke paradigma pemanusiaan (manusiawi). Paradigma pemanusiaan ini diwujudkan dengan menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan realisasinya. Masyarakat didudukkan sebagai pelaku utama pembangunan serta diberdayakan agar mampu menangani permasalahan dalam pembangunan lingkungannya.

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan, seharusnya tidak hanya berhenti pada upaya untuk menemukan solusi konseptual yang partisipatif dan '*locally genuine*'. Solusi konseptual tersebut perlu dijabarkan secara profesional dan diformalkan dalam konsep penataan ruang kawasan/wilayah terkait.

## 1.2 Tujuan dan Sasaran

### 1.2.1 Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah menyiapkan rencana pengembangan infrastruktur yang tertuang dalam rencana tata ruang (*spatial planning*) untuk Teluk Dalam, Nias Selatan yang melingkupi komponen-komponen infrastruktur terutama yang mendukung perencanaan pariwisata yang berbasis pada masyarakat.

### 1.2.2 Sasaran

- Identifikasi potensi dan permasalahan infrastruktur, terutama yang mendukung kegiatan kepariwisataan.
- Identifikasi kluster-kluster kawasan pengembangan pariwisata.
- Identifikasi kebutuhan-kebutuhan pengembangan infrastruktur berdasarkan skala prioritas.
- Terumuskannya pedoman bagi pengambil kebijakan pembangunan untuk mengambil langkah strategis dan sekaligus menentukan prioritas yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang mendesak ataupun berdasarkan pertimbangan teknis dan strategis perkembangan wilayah, serta aspirasi masyarakat.

## 1.3 Ruang Lingkup

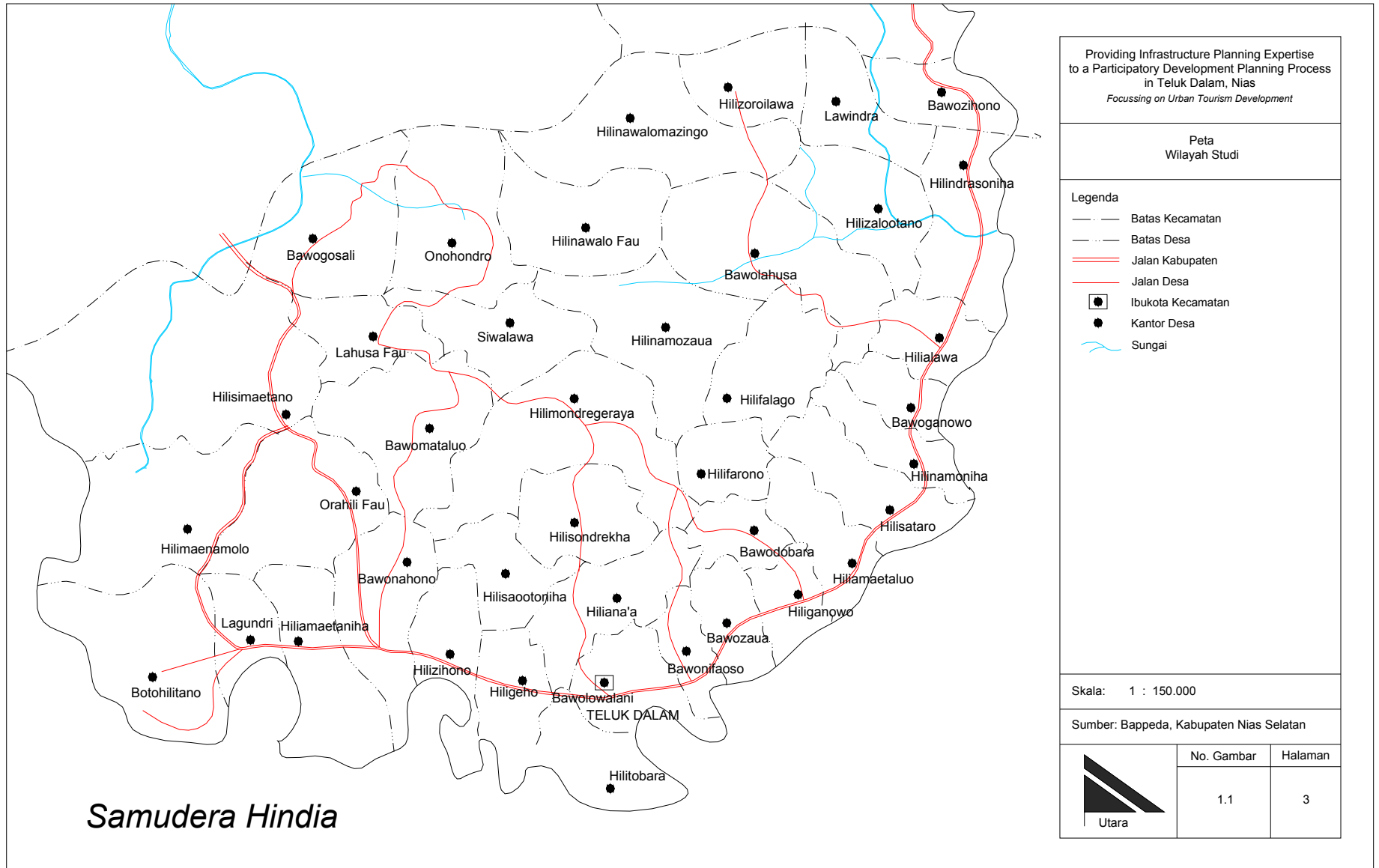
### 1.3.1 Lingkup Wilayah

Wilayah studi adalah wilayah Kecamatan Teluk Dalam yang merupakan ibukota Kabupaten Nias Selatan dengan unit kajian adalah desa-desa penyangga kawasan perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan bagi kegiatan di Kabupaten Nias Selatan serta desa-desa yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat kegiatan pariwisata, di antaranya adalah Desa Hilisataro, Desa Hilimaetaluo, Desa Hiliganowo, Desa Bawodobara, Desa Bawozauo, Desa Bawonifaoso, Desa Bawolawalani, Kelurahan Teluk Dalam, Desa Hilitobara, Desa Hiligeho, Desa Hilizihono, Desa Hiliamaetaniha, Desa Lagundri, Desa Botohilitano, Desa Bawonahono, Desa Bawomataluo, Desa Hilisondrecha, dan Desa Hilinawalo Mazingo.

### 1.3.2 Lingkup Materi

Output dari pelaksanaan studi ini adalah suatu pedoman pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan pariwisata di Kabupaten Nias Selatan, khususnya di wilayah Teluk Dalam. Pedoman pengembangan meliputi perencanaan komponen-komponen infrastruktur yang merupakan hasil dari penjaringan informasi dan aspirasi masyarakat dengan pertimbangan skala prioritas.

Output ini nantinya dijadikan pedoman, baik bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dalam mengambil kebijakan pembangunan untuk Nias Selatan. Juga bagi lembaga-lembaga yang berminat dan mempunyai kepentingan dalam kegiatan pembangunan di Nias Selatan ini.



## 1.4 Metodologi

### 1.4.1 Kerangka Pikir

Studi tentang proses perencanaan infrastruktur pendukung pariwisata berbasis partisipasi masyarakat dilatarbelakangi oleh kondisi infrastruktur yang ada di wilayah Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan. Kondisi infrastruktur yang ada pasca gempa dan tsunami saat ini sangat tidak memadai dalam mendukung kegiatan pariwisata yang memang menjadi sektor unggulan Kabupaten Nias Selatan. Bahkan sebelum terjadi bencana, kondisi infrastruktur belum optimal dalam mendukung kegiatan pariwisata. Selain itu sebagai kabupaten yang baru berkembang juga mengharuskan keterlibatan semua pihak yang terkait dalam mendukung perkembangan daerah secara keseluruhan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perencanaan infrastruktur sangatlah diperlukan khususnya dalam mendukung pengembangan sektor kepariwisataan Kabupaten Nias Selatan. Dalam proses ini akan mengacu kepada kerangka pikir yang tahapannya terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

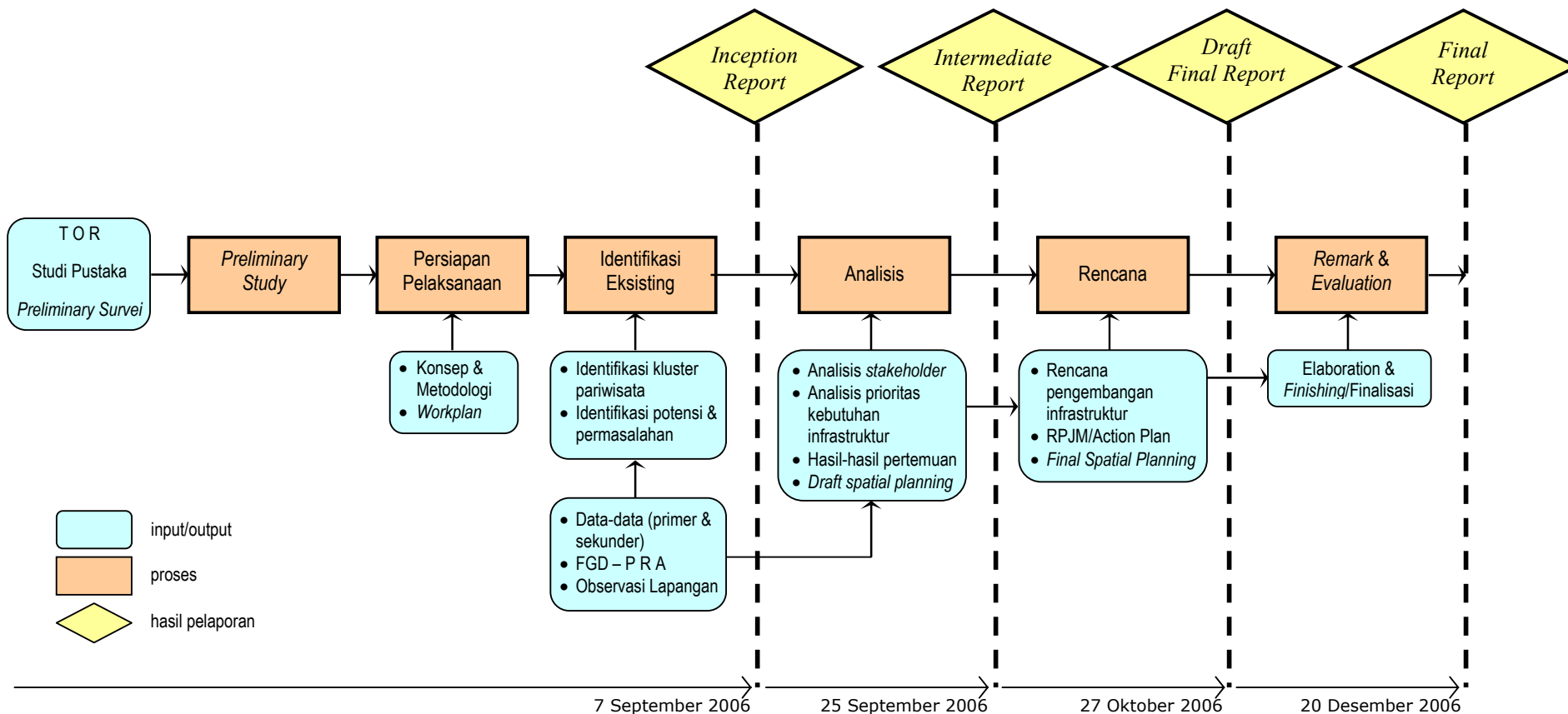
#### *Inception Report*

- a. Tahapan awal yang dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan *preliminary study* yang merupakan review terhadap kerangka acuan (TOR) dengan didukung studi kepustakaan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, kepariwisataan, dan pembangunan partisipatif, serta dengan melakukan survei awal lapangan di wilayah studi.
- b. Tahapan selanjutnya adalah persiapan pelaksanaan yang melingkupi kesiapan materi-materi konsep dan metodologi yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur dan menyiapkan rencana kerja untuk tahapan-tahapan selanjutnya.
- c. Dalam laporan ini juga memaparkan identifikasi eksisting wilayah perencanaan terhadap potensi dan permasalahan yang sekiranya perlu dikaji sebagai dasar analisis dan rekomendasi yang akan diusulkan dalam hasil studi ini. Adapun dasar-dasar untuk identifikasi ini adalah input data, baik berupa data primer yang didapat melalui survei lapangan, *Focussed Group Discussion* (FGD) dan wawancara secara langsung dengan masyarakat dan survei sekunder yang dilakukan dengan mengambil data-data yang mendukung ke instansi-intansi terkait. Identifikasi-identifikasi yang dilakukan meliputi identifikasi potensi dan permasalahan wilayah studi yang terbagi dalam permasalahan fisik, sosial, ekonomi, serta infrastruktur, dan secara khusus dilakukan identifikasi kluster-kluster pariwisata yang merupakan langkah awal dalam menentukan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di wilayah Teluk Dalam.

#### *Intermediate Report*

Pada tahap ini dilakukan proses analisis. Adapun input pada tahapan ini didapat melalui identifikasi eksisting serta informasi-informasi yang didapat melalui penjangkaran informasi melalui pertemuan-pertemuan dengan aparat pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat, agama, pendidikan, wanita, pemuda, adat, dan sebagainya. Yang dikaji dalam laporan ini meliputi:

- a. Analisis *stakeholder* yang dilakukan untuk melihat profil, potensi, kontribusi, input, peran, dan akses para *stakeholder*. Adapun teknik identifikasi yang dilakukan adalah berupa wawancara, dan penyebaran kuesioner.



**Gambar 1.2**  
 Kerangka Pikir  
 Providing Infrastructure Planning Expertise to a Participatory Development Planning Process in Teluk Dalam, South Nias  
 Focussing on Urban Tourism Development

Prinsip dalam analisis ini adalah keterlibatan semua pihak, dengan relevansi tidak semua pihak yang dilibatkan namun cukup mereka yang memegang peran penting dalam proses dan kepekaan jender.

- b. Analisis prioritas kebutuhan infrastruktur yang dilakukan untuk menentukan skala prioritas terhadap rencana pengembangan infrastruktur terutama yang berkaitan dengan sektor kepariwisataan.

#### ***Draft Final Report dan Final Report***

Pada tahapan ini output yang dihasilkan adalah progres dari laporan intermediate yang sudah memunculkan konsep dan strategi rencana pengembangan infrastruktur yang berkaitan dengan pengembangan sektor kepariwisataan, dan RPJM/*action plan* serta final rencana tata ruang.

Sedangkan *Final Report* merupakan hasil perbaikan/penyempurnaan maupun revisi atas evaluasi dan koreksi terhadap *draft final report* dan menjadi hasil akhir dari seluruh pekerjaan.

#### **1.4.2 Pendekatan Studi**

##### **a. Pendekatan Partisipatif**

Partisipasi masyarakat adalah pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan, dan bukan lagi '*as an only object*'. Pembangunan partisipatif mengacu pada paradigma populis yang diartikan sebagai proses pembangunan yang menyeluruh dengan memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada baik secara individu, kelompok sosial maupun kelompok masyarakat secara teritorial pada skala menengah – kecil melalui mobilisasi kemampuan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan bersama baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Harapan utama dari perkembangan paradigma ini pada tataran aplikatif adalah untuk mengeliminasi terjadinya disparitas.

##### **b. Pendekatan Keruangan (*Spatial Approach*)**

Pembangunan infrastruktur menyangkut pembangunan yang menyeluruh. Konsep pengembangan dan strategi pemanfaatan infrastruktur tidak memandang batasan administrasi tersebut sebagai batasan spasial. Pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi pendorong bagi perkembangan wilayah-wilayah sekitar sehingga akan mencapai pemerataan pembangunan.

##### **c. Pendekatan Prioritas (*Priority Approach*)**

Pendekatan prioritas digunakan untuk menentukan komponen-komponen infrastruktur serta program-program pembangunan yang dituangkan dalam suatu indikasi program yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

##### **d. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**

Dengan pendekatan ini maka hasil dari perumusan konsep, strategi, dan skenario pengembangan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan hasil-hasilnya bagi kepentingan generasi mendatang. Pemahaman pembangunan berkelanjutan harus didasari pada identifikasi yang tajam mengenai daya dukung (*supporting capacity*) dan daya tampung (*carrying capacity*) lingkungan terhadap kehidupan di atasnya. Keberlanjutan juga meliputi keberlanjutan dalam hal pengelolaan karena dalam konsep pembangunan partisipatif, keterlibatan masyarakat berlangsung terus-menerus dari tahap perencanaan, implementasi dan monitoring hingga evaluasi pelaksanaan pembangunan.

### 1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Beberapa metoda pengumpulan data yang dilakukan dalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

#### a. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dalam rangka penelaahan dasar hukum dan tinjauan awal (*Preliminary Study*) literatur-literatur yang berkaitan dengan pekerjaan perencanaan pembangunan infrastruktur maupun data-data sekunder yang mendukung. Studi pustaka dilakukan dari instansi-instansi terkait maupun sumber-sumber literatur atau referensi lainnya.

#### b. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi potensi dan permasalahan yang ada di lapangan. Observasi lapangan dilakukan guna melakukan *Cross Check* terhadap identifikasi/kompilasi data yang telah dilakukan sebelumnya. Observasi lapangan juga dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk menganalisis suatu potensi dan permasalahan dalam rangka memperoleh rumusan kebijakan pengembangan infrastruktur di wilayah perencanaan.

Dalam kegiatan ini beberapa data yang diperlukan antara lain:

- Kondisi fisik dan geografis wilayah studi
- Data kondisi jaringan infrastruktur yang ada (jalan, air bersih, kelistrikan, telekomunikasi, kepariwisataan dan lain-lain), termasuk kondisi potensi dan permasalahan sosial budaya yang berkembang saat ini.

Data-data tersebut dikumpulkan kemudian ditinjau/dikaji ulang untuk menentukan jaringan infrastruktur yang mendapat prioritas sebagai usulan pekerjaan untuk program pembangunan mendatang yaitu pembangunan baru, peningkatan, serta program pemeliharaan berdasarkan data dan informasi maupun aspirasi yang diperoleh.

#### c. *Focussed Group Discussion* (FGD)

*Focussed Group Discussion (FGD)* adalah kegiatan diskusi mengenai topik tertentu dalam rangka menggali data dan informasi yang bersifat eksisting maupun program, terkait dengan komponen-komponen infrastruktur di wilayah studi. Kegiatan diskusi ini lebih efektif dalam pembahasan permasalahan karena lebih fokus dan terarah. Yang diharapkan dari kegiatan FGD ini adalah:

- Pengumpulan data kualitatif yang efektif dan efisien melalui diskusi dan pembahasan dengan seluruh *stakeholder* pembangunan.
- Dinamika kelompok yang terbangun dapat difokuskan pada masalah dan isu utama sehingga secara otomatis dapat diketahui seberapa jauh terdapat konsistensi dan kesamaan persepsi atau pandangan di kalangan peserta.
- Kelompok peserta dapat melakukan kendali mutu data, informasi, dan output pekerjaan serta saling mengecek, sehingga dapat dihindarkan perbedaan pendapat dan persepsi.

FGD ini dilaksanakan pada tingkat kecamatan diikuti oleh *stakeholder* pembangunan yang meliputi:

- Perwakilan dari masyarakat (tokoh pemuda, wanita, pendidikan, agama)
- Lembaga adat
- Aparat pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten)

- Pemerintah daerah melalui dinas yang terkait
- LSM/NGO
- Pihak Swasta

Kegiatan FGD dilakukan dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (P R A). PRA ditekankan pada pengetahuan lokal dan memberdayakan masyarakat lokal untuk melakukan penaksiran, analisis, dan perencanaan secara mandiri. PRA menggunakan simulasi kelompok dan latihan-latihan untuk melayani penggunaan informasi bersama, analisis, dan aksi antar-*stakeholder*.

#### 1.4.4 Metode Analisis

##### a. Analisis *Stakeholder*

Analisis *stakeholder* merupakan alat untuk mengidentifikasi *stakeholder*. Pemahaman peran dan kontribusi potensial dari berbagai *stakeholder* merupakan prasyarat utama bagi perencanaan. Keterlibatan *stakeholder* akan mencerminkan berbagai kekuatan, interest/minat, dan sumber daya yang berbeda.

Tujuan dilakukannya analisis *stakeholder* adalah:

- Identifikasi berbagai *stakeholder* yang relevan dengan perencanaan pembangunan
- Memetakan peran dan kontribusi *stakeholder* dalam pembangunan sehingga dapat dikenali letak masalah yang menghambat potensi atau keterlibatan mereka
- Memaksimalkan peran dan kontribusi masing-masing *stakeholder* karena dengan dukungan aktif semua pihak akan mendorong keberhasilan aktivitas pembangunan.

##### b. Analisis SWOT

Analisis SWOT pada setiap komponen infrastruktur dilakukan berdasarkan pada temuan-temuan dari forum FGD maupun dari informasi-informasi yang diperoleh. Beberapa pertanyaan yang akan dijawab melalui analisis SWOT pada dalam perencanaan pembangunan infrastruktur antara lain:

- Kekuatan (*Strengths*) yaitu aspek internal positif yang dapat dikontrol dan dapat diperkuat dalam perencanaan.
  - ~ Potensi, keunggulan, dan keuntungan suatu kawasan atau program?
  - ~ Program-program, keinginan, upaya atau keberhasilan yang telah dilakukan?
- Kelemahan (*Weaknesses*) yaitu aspek internal negatif yang dapat dikontrol dan dapat diperbaiki dalam perencanaan.
  - ~ Permasalahan yang perlu diperbaiki?
  - ~ Kendala-kendala internal (teknis maupun pengelolaan)?
- Peluang (*Opportunities*) yaitu kondisi eksternal positif yang tidak dapat dikontrol dan dapat diambil keuntungannya.
  - ~ Kesempatan baik yang sedang dihadapi?
  - ~ Kecenderungan perkembangan yang mendesak/penting saat ini?
  - ~ Kebijakan-kebijakan baru?
  - ~ Perubahan sosial?
  - ~ Aspirasi-aspirasi yang berkembang?
- Ancaman (*Threats*) yaitu kondisi eksternal negatif yang tidak dapat dikontrol dan mungkin dapat diperkecil dampaknya.
  - ~ Hambatan yang sedang dihadapi?
  - ~ Persaingan?
  - ~ Tuntutan perubahan karena kendala-kendala alam?

### c. Analisis Penentuan Prioritas

Perencanaan pembangunan infrastruktur dirinci hingga perumusan program pembangunan, penahapan, serta sistem pengelolaannya. Hal ini karena suatu rencana pembangunan dapat dilaksanakan bila ketiga aspek penting tersebut telah disusun dengan tepat. Oleh karena itu, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu indikasi program adalah sebagai berikut:

- Skala Prioritas

Berdasarkan pertimbangan ini, maka untuk komponen-komponen infrastruktur yang mempunyai tingkat kemendesakan/urgensi tinggi menjadi prioritas utama. Tingkat kemendesakan ini diperoleh dari hasil analisis kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dengan menggunakan standar kebutuhan yang ada dan aspirasi masyarakat. Selain itu, sebagai bahan kajian utama adalah perlunya diperhatikan jenis kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan dasar. Dari hasil analisis tersebut diperoleh urutan skala prioritas kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan yang benar-benar sesuai dengan kondisi eksisting dan kebutuhan masyarakat di wilayah perencanaan.

- Waktu Perencanaan dan Pelaksanaan

Apabila komponen-komponen infrastruktur dinilai memiliki tingkat kemendesakan yang sama maka pemeringkatan skala prioritas dapat dilakukan dengan dasar pertimbangan waktu perencanaan atau pelaksanaannya. Penilaiannya adalah bila elemen infrastruktur dengan waktu perencanaan dan pelaksanaannya lebih pendek/cepat maka dapat lebih diprioritaskan. Demikian juga sebaliknya, bila elemen kebutuhan tersebut memiliki masa perencanaan dan pelaksanaan lebih panjang/lama dapat masuk pada skala prioritas berikutnya.

- Kemampuan Pendanaan

Kemudian bila dari kedua pertimbangan di atas mempunyai skala prioritas yang sama, maka kemampuan pendanaan akan sangat menentukan urutan skala prioritas. Berdasarkan kondisi kemampuan pendanaan tentu akan dipilih elemen kebutuhan dengan anggaran terkecil untuk menjadi prioritas utama. Demikian seterusnya, sampai suatu kawasan memiliki kemampuan dana yang memadai untuk melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan dengan anggaran lebih besar.

### d. Analisis Kebutuhan Infrastruktur

Analisis kebutuhan infrastruktur dilakukan untuk menentukan komponen-komponen infrastruktur yang perlu direncanakan dalam mendukung kegiatan pariwisata. Komponen-komponen infrastruktur yang dikaji meliputi sistem transportasi, jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan sarana kepariwisataan lainnya.

- Prasarana Transportasi

Rencana pengembangan prasarana transportasi didasarkan pada:

- ~ Kebutuhan transportasi, yaitu kebutuhan perpindahan orang menurut asal-tujuan perjalanan, pilihan moda, dan tingkat pelayanan yang diinginkan.
- ~ Fungsi, yaitu kegiatan yang menghubungkan simpul dan ruang kegiatan yang meliputi kepentingan lalu lintas dan kepentingan angkutan.
- ~ Peranan, yaitu tingkat hubungan antarsimpul dan ruang kegiatan menurut fungsinya yang dikelompokkan dalam jaringan antarkota serta perdesaan menurut hirarki masing-masing.

- ~ Kapasitas jalan, yaitu volume lalu lintas yang dikaitkan dengan jenis, dimensi, daya angkut dan kecepatan kendaraan.
  - ~ Kelas jalan, yaitu klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan daya dukung jalan, serta karakteristik lalu lintas.
- Prasarana Air Bersih
 

Penghitungan kebutuhan air bersih ini dilakukan dengan menggunakan standar kebutuhan air bersih dari DPU Cipta Karya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan rata-rata di wilayah perencanaan. Asumsi-asumsi untuk penghitungan kebutuhan air bersih di Teluk Dalam antara lain:

    - ~ Rumah tangga (domestik) : 90 lt/org/hari
    - ~ Nondomestik : 20-30% dari kebutuhan domestik
    - ~ Hidran umum : 30 lt/org/hari
    - ~ Kebocoran : 30% kebutuhan total air bersih
  - Prasarana Kelistrikan
 

Sedangkan acuan dalam pengembangan jaringan listrik, sebelumnya ditentukan bahwa besarnya energi listrik maksimum rata-rata yang dibutuhkan setiap keluarga yaitu 900 KW/KK untuk kota sedang dan 450 KW/KK untuk kota kecil dan perdesaan. Di wilayah Teluk Dalam yang sebagian besar masih berupa daerah perdesaan maka kebutuhan listrik untuk setiap rumah tangga adalah 450 KW. Asumsi-asumsi yang digunakan secara rinci adalah:

    - ~ Rumah tangga (domestik) : 450 KW
    - ~ Nondomestik : 30% dari kebutuhan domestik
    - ~ Penerangan jalan : 10% dari kebutuhan domestik
  - Prasarana Telekomunikasi
 

Standar pengadaan sarana telepon di Teluk Dalam adalah:

    - ~ Rumah tangga (domestik) : 1 sst untuk setiap 100 jiwa
    - ~ Non domestik : 10% dari kebutuhan domestik
    - ~ Teltepon umum : 1 unit untuk setiap 1000 jiwa
  - Prasarana Pariwisata
 

Dalam studi ini, metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan komponen wisata yang berupa wisatawan (pasar wisata), atraksi wisata, ketersediaan sarana prasarana wisata, transportasi, dan pemasaran wisata. Semua dideskripsikan dengan jelas tentang kondisi, persebaran, dan kelengkapannya dalam mendukung keterkaitan antarobyek. Dalam analisis ini juga akan disertakan penginterpretasian peta-peta untuk memperjelas kondisi komponen-komponen tersebut.

Analisis ini dilakukan dengan memberikan nilai/skor pada variabel komponen wisata yang telah ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan studi. Dalam studi ini, output dari analisis skoring berupa kebutuhan prasarana obyek wisata.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam *Final Report* kegiatan *Providing Infrastructure Planning Expertise to a Participatory Development Planning Process in Teluk Dalam, South Nias - Focusing on Urban Tourism Development* adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, menguraikan tentang latar belakang dilaksanakannya kegiatan *Providing Infrastructure Planning Expertise to a Participatory Development Planning Process in Teluk Dalam, Nias - Focusing on Urban Tourism Development* yang meliputi tujuan, ruang lingkup wilayah dan materi, serta pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam studi ini.

**BAB II TINJAUAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR KECAMATAN TELUK DALAM**. Pada bab ini dilakukan tinjauan mengenai kebijakan pembangunan daerah yang berkaitan dengan pengembangan wilayah Teluk Dalam, serta tinjauan terhadap kondisi kependudukan, infrastruktur, dan potensi pariwisata di wilayah Teluk Dalam yang menjadi fokus kajian studi ini.

**BAB III ANALISIS PERENCANAAN PARTISIPATIF INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PARIWISATA**. Bab ini menguraikan analisis terhadap proses partisipatif perencanaan infrastruktur pendukung pariwisata di Teluk Dalam. Kajian juga meliputi analisis terhadap pengembangan pariwisata dalam hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pariwisata dengan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata.

**BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PARIWISATA DI TELUK**, menguraikan konsep, strategi, dan skenario pengembangan infrastruktur pariwisata yang kemudian dituangkan dalam suatu indikasi program pembangunan untuk jangka waktu sepuluh tahun untuk diimplementasikan bagi pembangunan pariwisata Teluk Dalam.

**BAB V PENUTUP**, berisi tentang kesimpulan dari seluruh kajian serta rekomendasi terhadap tindak lanjut kegiatan berikutnya serta masukan-masukan untuk perbaikan-perbaikan kondisi yang ada.